

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BAMBU KEPUTIH DI KOTA SURABAYA

Yusuf Hariyoko

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 60118

Email: yusufhari@untag-sby.ac.id

Received: 11 Oktober 2022 | Revised: 28 Juni 2023 | Accepted: 29 Juni 2023

Abstract: Tourism objects are very important to manage, because they have a good role in the regional economy and society. The Bamboo Forest in Surabaya City is a new tourist attraction that continues to increase in its attractiveness, but there are still many shortcomings. This research was conducted to see that the development that has been carried out by the Surabaya City Government is able to answer the existing problems. This research uses qualitative research with a case study approach. The results show that the development of bamboo forest tourism objects is quite good. Communication has been built between the government and its agencies, as well as the community. The management of human resources has been well regulated and the financial problems of the city government in the development of tourism objects are needed to build supporting facilities. The social and economic environment gives a good signal with the existence of bamboo forests. The community has got a role and needs to increase its participation again. And, there are still problems in the provision of infrastructure and infrastructure in bamboo forest tourism objects.

Keyword: collaborative governance; bamboo forest; development; tourism object

Abstrak: Obyek wisata sangat penting untuk dikelola, karena punya peran yang bagus dalam perekonomian daerah dan masyarakat. Hutan Bambu di Kota Surabaya adalah obyek wisata baru yang terus meningkat daya tariknya, namun masih banyak kekurangan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengembangan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya mampu menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa dalam pengembangan obyek wisata hutan bambu sudah cukup baik. Komunikasi sudah dibangun antara pemerintah dengan instansi-instansinya, beserta masyarakat. Sumber daya manusia pengelola sudah diatur dengan baik dan masalah finansial dari pemerintah kota dalam pengembangan obyek wisata yang diperlukan untuk membangun fasilitas pendukung. Lingkungan sosial dan ekonomi memberikan sinyal yang baik dengan adanya hutan bambu. Masyarakat sudah mendapat peran dan perlu untuk ditingkatkan lagi partisipasinya. Serta, masih adanya permasalahan pada penyediaan infrastruktur dan prasarana yang ada di obyek wisata hutan bambu.

Kata kunci: collaborative governance; hutan bambu; obyek wisata; pengembangan

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan tempat dimana seseorang maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi atau tujuan tertentu selain rekreasi dapat memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat indah dan kaya akan alam dan budaya serta dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata mulai dari wisata budaya, wisata bahari, dan wisata alam yang alami berupa pemandangan alam. Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di lokasi objek wisata (Pitana & Gayatri, 2005). Undang-Undang Nomor 10 Tahun (Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009) tentang Kepariwisata menyatakan bahwa tujuan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; sumber daya; memajukan kebudayaan; mempererat persahabatan antar bangsa dan menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Pariwisata yang merupakan sektor integrasi, tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada kerjasama dan daya dukung dari berbagai pihak. Integrasi tersebut mulai dari aktivitas utama wisata, kuliner, souvenir, aksesibilitas, transportasi, dan lain-lain. Peran UMKM menjadi penting untuk memberikan pekerjaan pada warga sekitar dan menambah pengalaman dari pengunjung untuk menikmati tempat wisata (Imaniar & Wahyudiono, 2019; Ansell & Gash, 2008) menjelaskan bahwa proses kolaborasi merupakan proses panjang yang punya tujuan yang jelas dikarenakan peran dan kepentingan aktor yang beragam pada urusan tertentu. Dalam *collaborative governance* diawali pada proses kesadaran untuk menyelesaikan masalah yang ada dan tidak dapat diselesaikan bersama. *Input-an* dari *collaborative governance* adalah kewenangan tiap aktor, hubungan antar aktor, dan harapan pada masalah yang ingin diselesaikan (Ansell & Gash, 2008, p. 550). Pada prosesnya akan berkembang dan terus bertumbuh proses kolaborasi sesuai dengan hasil kerjasama dan akan menjadi input-an awal keberlangsungan kolaborasi antar aktor (Emerson & Gerlak, 2014).

Kota Surabaya juga memiliki obyek wisata yang cukup banyak berjumlah 55 (*55 Tempat Wisata Di Surabaya Terbaru & Terbits Dikunjungi - Java Travel*, n.d.), dari yang mayoritas pusat perbelanjaan, taman, dan situs buatan yang lain. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.23 Tahun (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata, 2012) tentang Kepariwisata merupakan landasan hukum pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola dan mengembangkan sektor wisata. Pada pasal 1 nomor 14 juga ditekankan bahwa pengembangan pariwisata mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Peraturan daerah (Perda) tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah Kota untuk menggandeng pihak masyarakat dalam mengembangkan sektor wisata. Dalam mengembangkan obyek wisata perlu adanya kolaborasi antar aktor (Hariyoko et al., 2021).

Jumlah pengunjung Hutan Bambu juga cukup banyak dan cenderung meningkat setiap waktu sebagai alternatif wisata yang ada di Kota Surabaya. Secara historis, obyek tersebut

merupakan transformasi dari kawasan TPA menjadi obyek wisata. Minimnya aspek pendukung obyek wisata tersebut masih belum disediakan secara baik, selain itu peran masyarakat masih belum terlalu mencolok dalam obyek wisata Hutan Bambu. Pemahaman masyarakat sekitar lokasi wisata yang harusnya mendukung lokasi tersebut juga masih belum sejalan, karena masih menganggap hutan bambu sebagai tempat yang masih kawasan TPA. Kepemilikan pengelolaan kawasan masih berada di bawah pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Renstra DLH periode 2016 sampai 2021 juga ada program peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan kerjasama bersama pihak lain khususnya masyarakat untuk memberikan ruang partisipasi dalam peningkatan lingkungan hidup (DLH Kota Surabaya, 2019, p. 53). Sehingga kolaborasi yang masih belum terlihat diarahkan untuk dapat terlaksana dengan baik dalam meningkatkan pembangunan wisata di Kota Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Pendekatan *collaborative governance* dalam penyelesaian masalah di berbagai aspek menjadi hangat seringkali digunakan dalam kajian administrasi publik. Pendekatan ini populer dengan kajian yang dilakukan oleh (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan tersebut melibatkan kolaborasi antar aktor yang digunakan untuk membahas dan menyelesaikan suatu masalah dengan komponen sebagai berikut:

1. Tahap awal dimulai dengan adanya kesadaran akan ketidakseimbangan *power*, sumberdaya dan pengetahuan pada masalah. Didukung dengan sejarah konflik dan kerjasama yang telah berlangsung. Hal tersebut akan digerakkan dengan batasan dan insentif dari kolaborasi.
2. Tahap proses kolaborasi, diawali dengan adanya dialog, akan menghasilkan kepercayaan antar aktor yang kemudian akan berkembang menjadi komitmen, hal tersebut akan berkembang dengan pemahaman dan menjadi hasil sementara yang muncul dari proses kolaborasi.
3. Desain kelembagaan, merupakan wadah yang diciptakan untuk proses kolaborasi yang dibutuhkan. Wadah ini menyesuaikan dengan kepentingan dan urusan yang diatur oleh kolaborasi yang disepakati (Ansell & Gash, 2018).
4. Kepemimpinan fasilitatif, merupakan komponen yang penting dalam proses kolaborasi. Peran pemimpin kolaborasi ini dapat diawali oleh pemerintah sebagai regulator untuk menciptakan wadah yang memiliki legalitas dan kepercayaan dari masyarakat.
5. Dampak akhir, merupakan tujuan penyelesaian masalah yang diharapkan adanya *collaborative governance* dan menjadi akhir dari proses kolaborasi.

Pada dasarnya, proses kolaborasi merupakan kegiatan yang sulit untuk dilanjutkan dan diselesaikan dengan minimnya kemampuan dan kesepahaman antar aktor. Kolaborasi tidak selalu menjanjikan keberhasilan yang baik dan kadangkala menyebabkan masalah lain yang pada dasarnya menjadi sumber konflik baru (Brown et al., 2010). Keselarasan dalam lembaga dan organisasi dari pemimpin untuk mengatur berbagai aspek merupakan hal yang penting dan menarik untuk dipahami, karena pastinya melibatkan berbagai macam pihak. Lebih khusus pada sektor pariwisata yang membutuhkan kerjasama antar aktor dalam pengembangannya menjadi menarik untuk dipahami dan diteliti (Hariyoko et al., 2021).

Pengembangan wisata

Wisata telah menjadi kegiatan yang bergeser dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan dasar untuk saat ini (Mulyawan et al., 2015). Pergeseran tersebut merupakan potensi penting yang perlu untuk digapai oleh setiap pihak dalam membangun dan mengembangkan ekonominya. Pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan dengan pertumbuhan masyarakat, terus mendorong adanya wisata baru dan usaha baru untuk menggenjot ekonomi (Razzak & Qodir, 2020). Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di lokasi objek wisata (Pitana & Gayatri, 2005).

Pertumbuhan wisata yang dialami oleh Indonesia semakin lama semakin baik dan menjadi potensi ekonomi baru. Adanya pengembangan wisata sangat menarik untuk dilakukan karena akan menyeret sektor lain untuk juga berkembang (Hidayah & Agustinah, 2019). Arah perkembangan tersebut pastinya lebih positif dampaknya pada aspek lingkungan dan sosial dibandingkan dengan industrialisasi (Zhu et al., 2021). Sehingga sektor wisata akan selalu menarik untuk terus dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk ke depannya (W. Wang et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan dapat mendapatkan penjelasan masalah yang diteliti secara lebih mendalam. Lokasi penelitian adalah kawasan Wisata Hutan Bambu Kota Surabaya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Fokus penelitian menyesuaikan dengan konsep dari (Ansell & Gash, 2008) tentang *collaborative governance* yaitu aktor dan kepentingannya, desain institusional, kepemimpinan, dan dampak. Data primer berupa wawancara dan Data Sekundernya adalah dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, serta data pengunjung wisata. Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang terdiri dari pengambilan data, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan display data (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor dan Kepentingannya

Usaha untuk menjaga dan memberikan ruang pada setiap aktor memang sudah ada dan tercantum dalam RPJMD pemerintah Kota Surabaya periode 2021-2026. Usaha tersebut didasari dengan analisis masalah bahwa “Belum optimalnya kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata” (Pemerintah Kota Surabaya, 2021, pp. IV-2). Kesadaran tersebut berusaha untuk diterjemahkan dengan kebijakan meningkatkan kerjasama antar aktor yang berkepentingan dengan kegiatan wisata di Kota Surabaya. Dalam urusan pengelolaan wisata hutan bambu ada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, karena area tersebut masih masuk dalam TPA. Namun, dalam proses penyusunan kebijakan pula kawasan hutan bambu tersebut juga tidak masuk dalam perencanaan pembangunan kawasan wisata yang ada dalam RPJMD. Kawasan tersebut masih belum dianggap sebagai tempat wisata, karena masih dalam pemahaman kawasan TPA.

Masyarakat sekitar wisata yang merupakan pihak penerima manfaat adanya obyek wisata dan peran mereka secara tidak langsung akan memberikan perannya dalam pengembangan obyek wisata (Idris et al., 2018). Peran lain dari masyarakat sekitar adalah untuk menciptakan

kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Masyarakat adalah aktor yang perlu dikelola oleh pemerintah dengan menciptakan institusi yang dikelola komunitas (Rohimah et al., 2018). Sehingga, usaha pemerintah dalam mengembangkan sebuah obyek wisata tidak bisa lepas dari peran masyarakat sekitar. Peran masyarakat dalam urusan pengelolaan dan pengembangan dari kawasan hutan bambu keputih ini masih belum nampak. Masyarakat kurang mendapat ruang dalam proses pengelolaan dan pengembangan hutan bambu. Aktivitas wisata yang ada di dalam hutan bambu tersebut masih sepenuhnya dikelola oleh DLH. Masyarakat sekitar juga berfokus pada aktifitasnya yang ada di luar kawasan wisata dengan penyediaan makanan atau kebutuhan pengunjung yang ada di luar. Pihak swasta juga tidak banyak berkontribusi dalam pengembangan kawasan tersebut karena perannya sebagai wisata alternatif. Padahal masyarakat yang mendukung sektor wisata yang ada disekitaran tempat tinggalnya akan mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi baru yang memberikan manfaat secara langsung (Suprojo & Siswanto, 2017).

Minat dalam berinvestasi dari pihak swasta juga tidak nampak kepada pemerintah Kota Surabaya. Peran swasta harusnya dapat diarahkan memberikan CSR mereka ke pengembangan wisata tersebut (Rachmansyah et al., 2020). Akademisi dalam menciptakan lingkungan yang positif dalam kawasan wisata hutan bambu tersebut sering melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hampir setiap tahun ada aktivitas yang dilaksanakan di kawasan tersebut dengan berbagai pendekatan keilmuan. Aktivitas yang sudah ada dari perguruan tinggi untuk melaksanakan pengembangan pada aspek tertentu perlu diwadahi dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga ke depannya akan menciptakan partisipasi akademik yang terarah (Untari, 2019).

Proses Kolaborasi

Pada proses kolaborasi ini berkaitan dengan pengembangan wisata yang ada di hutan bambu keputih. Obyek wisata tersebut merupakan “hasil sulapan” dari TPA yang potensial dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah Kota Surabaya mengajak serta partisipasi antar aktor dalam mengembangkan obyek tersebut. Inisiatif yang diawali oleh DLH selaku pengelola telah mampu menggandeng masyarakat, akademisi, dan swasta untuk ikut serta dalam membangun kawasan tersebut. Masuknya tiap aktor dalam proses kolaborasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan pemahaman tiap aktor tersebut pada perkembangan hutan bambu keputih tersebut. Kolaborasi awal bisa dikatakan bahwa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang menjadi pihak yang paling terdampak dengan adanya obyek wisata dari segi lingkungan dan ekonomi (Wang et al., 2021).

Hasil yang ditunjukkan dari kolaborasi menarik peran serta dari pihak swasta dan akademisi untuk ikut mengembangkan kawasan tersebut. Peran serta pihak-pihak tersebut dilakukan secara simultan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan peluang dan sumberdaya yang mereka miliki. Akademisi mengarahkan kegiatan *tri dharma*-nya secara rutin, serta adanya beberapa CSR yang sifatnya tahunan dari pihak swasta. Dampak dari aktivitas akademisi dan swasta tersebut sedikit banyak telah memberikan aktor yang lain motivasi untuk terus berkembang (Thomson et al., 2009).

Desain Institusional

Institusi yang menjadi arena kolaborasi antar pihak yang bertujuan dalam pengembangan kawasan wisata hutan bambu keputih masih belum ada. Pemerintah Kota Surabaya juga belum membentuk aktivitas yang mengarah ke pembentukan institusi tersebut. Namun, aktivitas yang dilakukan oleh akademisi sudah berusaha menggerakkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan wisata hutan bambu keputih (Kurniawan & Oemar, 2020; News, 2019). Keberlanjutan dari kegiatan akademisi tersebut masih belum ada, dan dirasakan masyarakat masih kurang memberikan dampak. Proses yang sudah dilakukan oleh akademisi tersebut perlu mendapat masukan untuk menciptakan aktivitas keberlanjutan dan dapat memberikan manfaat pada pengembangan wisata hutan bambu kota Surabaya.

Peran pemerintah untuk menciptakan arena kolaborasi harusnya dapat didorong oleh berbagai pihak, selain berfungsi untuk menciptakan partisipasi, arena tersebut harus mampu untuk memberikan pemahaman arah kebijakan dari pemerintah dalam pengembangan sektor wisata. Masyarakat sebagai salah satu sasaran dalam pengembangan sebuah sektor pariwisata perlu mendapat perhatian lebih, karena masyarakat punya peran lain untuk membantu menjaga kawasan wisata apabila diberikan ruang dalam pengembangannya (Latianingsih et al., 2021). Keberhasilan dalam membuat institusi wisata juga harus mampu untuk menciptakan dampak langsung kepada peningkatan wisatawan yang berkunjung dan memberikan kesan yang baik bagi pengunjung tersebut (Arumsari et al., 2017). Dalam usaha untuk menciptakan kelembagaan pengelolaan dapat dilakukan dengan membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang membantu mewadahi peran serta semua pihak (Ihsom et al., 2019).

Kepemimpinan

Kepemimpinan yang menjadi salah satu faktor penting dalam proses kolaborasi. Dalam prosesnya di kolaborasi yang ada untuk pengembangan di wisata hutan bambu keputih, kepemimpinan dipegang oleh DLH yang memiliki wewenang untuk mengelola kawasan TPA yang di dalamnya ada wisata hutan bambu tersebut. Dalam renstra DLH sendiri juga sudah dijabarkan pentingnya peningkatan dari kawasan wisata hutan bambu keputih menjadi kawasan wisata yang utuh. Dalam kewenangannya untuk mengelola wisata bambu keputih tersebut, DLH memberikan kepada pegawai yang bertugas di kawasan TPA untuk mengelola. Pelibatan masyarakat sekitar lokasi wisata masih belum terlihat dan memberikan aktivitas yang sesuai dengan pembangunan wisata yang kolaboratif, padahal masyarakat punya peran yang positif dalam pengembangan sektor wisata (Rohimah et al., 2018).

DLH sebagai pemimpin dan pihak yang berwenang dalam mengelola obyek wisata tersebut, dapat menumbuhkan pengembangan obyek wisata dengan memetakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki terlebih dahulu (Amil et al., 2019). Sumberdaya anggaran bisa sedikit di prioritaskan dalam menarik peran dari pihak lain, misalkan penyediaan tempat parkir dan mengajak pemuda sekitar untuk mengelola sarana tersebut (Idris et al., 2018). Membangun fasilitas sarana dan prasarana menjadi salah satu strategi dalam menciptakan sistem pengelolaan sebuah obyek wisata. Proses pengelolaan akan melibatkan lebih banyak pihak dengan keahlian yang dimiliki. Fokus juga tidak boleh hanya pada obyek wisata, tapi juga perlu memperhatikan produk unggulan, infrastuktur, aksesibilitas, daya tarik, dan promosi yang dilakukan (Rozikin et al., 2019).

Dampak Kolaborasi

Obyek wisata alam punya peran penting sebagai wisata alternatif dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Wisata dengan nuansa alam menjadi pilihan yang menarik untuk dinikmati dan sangat jarang. Kunjungan wisatawan lokal dari hutan bambu sendiri terus meningkat sampai dengan 2019 hampir 1000 pengunjung per minggu. Pengunjung tersebut jumlahnya menurun dikarenakan pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah wisatawan mulai bertumbuh pada masa 2021 an akhir, salah satu pendukungnya adalah mudahnya akses pada lokasi wisata (Lestari & Dewanti, 2019). Segmen pasar dari wisata hutan bambu semakin beragam dengan adanya banyak wahana permainan anak di taman harmoni yang ada di sebelahnya, sehingga menjadi tempat wisata keluarga.

Adanya tempat wisata di suatu kawasan harusnya dapat menjadi penopang pembangunan kawasan tersebut menjadi pusat perekonomian. Pergerakan ekonomi masyarakat menjadi titik penting dalam usaha mengembangkan kawasan sektor wisata (Mulyawan et al., 2015). Pengembangan kolaborasi antara pihak swasta, masyarakat, pemerintah, dan akademisi menjadi salah satu peluang yang akan menumbuhkan sebuah kawasan dan menyelesaikan masalah spesifik (Untari, 2019). Kesadaran setiap pihak pada pengembangan wisata, khususnya masyarakat perlu untuk diperkuat dengan menciptakan peran khusus dari Pokdarwis (Umam et al., 2020). Pembentukan pokdarwis tersebut kedepannya akan menjadi kunci dalam pengembangan wisata yang berbasis pada masyarakat.

PENUTUP

Penutup yang dapat diberikan oleh penelitian ini dalam meningkatkan proses pengembangan pariwisata adalah dengan melaksanakan kolaborasi dalam pengembangan wisata. Aktor yang ada dalam arena kolaborasi perlu diperkuat, khususnya peran masyarakat sekitar diberikan ruang lebih banyak dengan meningkatkan kesadaran mereka terlebih dahulu. Aktor lain sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti pemerintah yang melakukan pengelolaan secara tertata dengan memperhatikan sarana dan prasarana pendukung. Institusi yang menjadi ruang kolaborasi masih belum ada secara resmi, namun aktivitas sudah sering dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata. Kepemimpinan yang menjadi kunci dilakukan oleh DLH dengan baik, namun peran tersebut ternyata masih belum merangkul semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan wisata hutan bambu. Dampak dari kolaborasi tersebut adalah meningkatnya wisatawan dan beberapa masyarakat sekitar punya usaha yang berkaitan untuk mendukung wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- 55 Tempat Wisata di Surabaya Terbaru & Terbits Dikunjungi - Java Travel. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://www.javatravel.net/tempat-wisata-surabaya>
- Amil, A., Maniza, L. H., & Wahyudi, R. (2019). Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kenawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 167. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1274>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Arumsari, N., Eka Septina, W., Luthfi, M., & Kholis Ali Rizki, N. (2017). Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 86–99.
- Brown, T. L., Potoski, M., & Van Slyke, D. M. (2010). Contracting for complex products. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(SUPPL. 1), 41–58. <https://doi.org/10.1093/jopart/mup034>
- DLH Kota Surabaya. (2019). *Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2021 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya*.
- Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2014). Adaptation in Collaborative Governance Regimes. *Environmental Management*, 54(4), 768–781. <https://doi.org/10.1007/s00267-014-0334-7>
- Hariyoko, Y., Biadi, E. P., & Susiantoro, A. (2021). Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Mojokerto Dengan Pendekatan Collaborative Governance (Studi Kasus Pemandian Air Panas Pacet). *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 11(1).
- Hidayah, A. N., & Agustinah, R. (2019). Balkondes Candirejo Magelang Sebagai Bentuk Pengembangan Desa Wisata Yang Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 3(1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/g6pt2>
- Idris, M. H., Syahida, N. P., & Ardyansyah, A. (2018). Upaya Pemerintahan Kabupaten Bima Dalam Melibatkan Masyarakat Membangun Wisata Lariti Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bima). *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.652>
- Ihsom, M., Nurhadi, N., Raharjo, K. M., & Zulkarnain, Z. (2019). Pengelolaan Coban Untuk Wisata Edukasi Dengan Pelibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pait, Kabupaten Malang. *Jurnal KARINOV*, 2(3), 152. <https://doi.org/10.17977/um045v2i3p152-156>
- Imaniar, D., & Wahyudiono, A. (2019). Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh). *Reformasi*, 9(2), 90. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1411>
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (2009).
- Kurniawan, J. D., & Oemar, E. A. B. (2020). Perancangan Media Periklanan dalam Mempromosikan Taman Hutan Bambu Keputih. *Barik*, 1(3), 127–140.
- Latianingsih, N., Susyanti, D. W., Syarweni, N., & Rudatin, C. L. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Pada Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah MADIYA Masyarakat Mandiri Berkarya*, 2(2), 91–96.
- Lestari, R., & Dewanti, D. S. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Wisata di Objek Wisata Alam Kalibiru Kulon Progo, Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.18196/jerss.030214>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third). SAGE Publications, Inc.
- Mulyawan, T. I., Barus, B., & Firdaus, M. (2015). Potensi Ekonomi Dan Arah Pengembangan Perekonomian Wilayah Di Desa-Desa Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 17(1), 25–32. <https://doi.org/10.29244/jitl.17.1.25-32>

- News, U. (2019). Peduli Lingkungan, S2 Keperawatan Ajak Masyarakat Kelola Sampah Plastik - Unair News. <https://News.Unair.Ac.Id/>.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, (2012).
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021). *Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2021-2026*.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Parwisata*. Andi.
- Rachmansyah, R. E., Afifuddin, & Widodo, R. P. (2020). Peran Karang Taruna dalam Pengembangan Wisata Panorama Jurang Toleh (Studi Pada Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Malang). *Respon Publik*, 14(1), 90–100.
- Razzak, F., & Qodir, Z. (2020). Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Komparasi di Desa Pongok, Desa Tegarejo, dan Desa Kalangan, Klaten, Jawa Tengah). *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i1.6419>
- Rohimah, A., Hariyoko, Y., & Ayodya, B. P. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Melalui Pendekatan Community Based. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JLAP)*, 4(4), 363–368.
- Rozikin, M., Wismanu, R. E., & Muttaqin, A. (2019). Model Collaborative Governance dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism. *MEDIA BINA ILMIAH*, 4(4), 2–8. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.345>
- Suprojo, A., & Siswanto, B. (2017). Pembangunan Kota Wisata Batu Dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Suatu Kajian Perspektif Perubahan Sosial dan Ekonomi). *Reformasi*, 7(1), 78–87. <https://doi.org/10.33366/rfr.v7i1.699>
- Thomson, A. M., Perry, J. L., & Miller, T. K. (2009). Conceptualizing and measuring collaboration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(1), 23–56. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum036>
- Umam, C., Pangesti, F. S. P., & Yuslistyari, E. I. (2020). Pemberdayaan Pokdarwis Tazgk Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kaduengang. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.24198/sawala.v1i1.25838>
- Untari, S. (2019). Kolaborasi Perguruan Tinggi-Pemerintah Desa-Swasta. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial*, 2(2), 75–81.
- Wang, N., Fang, M., Beauchamp, M., Jia, Z., & Zhou, Z. (2021). An indigenous knowledge-based sustainable landscape for mountain villages: The Jiabang rice terraces of Guizhou, China. *Habitat International*, 111, 102360. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102360>
- Wang, W., Liu, J., & Innes, J. L. (2019). Conservation equity for local communities in the process of tourism development in protected areas: A study of Jiuzhaigou Biosphere Reserve, China. *World Development*, 124, 104637. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104637>
- Zhu, J., Yuan, X., Yuan, X., Liu, S., Guan, B., Sun, J., & Chen, H. (2021). Evaluating the sustainability of rural complex ecosystems during the development of traditional farming villages into tourism destinations: A diachronic emergy approach. *Journal of Rural Studies*, 86(October 2020), 473–484. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.010>